BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara yang berdaulat memiliki hubungannya dengan dunia internasional, baik dengan Negara maupun komunitas intenasional lainnya. Hubungan tersebut nerupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Dalam interaksi hubungan internasional konflik dan kompetisi merupakan hal-hal yang tidak bisa di hindari baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Isu gerakan separatis di Papua merupakan isu yang perlu diperhatikan oleh suatu Negara, kasus Papua ibarat bom waktu bagi Indonesia. Banyak faktor yang mampu memicu isu Papua menjadi isu besar dan terbuka, yakni politik, keamanan, sosial, dan ekonomi. Dimensi persoalan Papua yang sangat beragam, baik itu nasional, dan internasional yang berpotensi kuat mengubah masalah yang bersifat nasional menjadi Internasional.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap sebagai permasalahan internal kini telah memasuki kategori eksternal setelah berbagai Negara dan kelompok dari luar negeri turut campur tangan, baik dalam mendukung kelompok yang mengatas namakan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau *United*

Liberation Movement for West Papua (ULMWP) secara langsung menjadi masalah yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis Papua.

Pergerakan gerakan separatis ULMWP telah meluas ke daerah lain di Indonesia bahkan di luar negeri. Pergerakan diberbagai daerah di Indonesia dilakukan beberapa mahasiswa asli Papua yang merupakan simpatisan OPM yang menginginkan kemerdekaan. Aksi-aksi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi referendum yang dicita-citakan. Sebagai contoh, di Yogyakarta sering terjadi aksi protes terhadap pemerintah dan tuntutan demi kemerdekaan Papua. Aksi pengibaran bendera bintang kejora dan orasi adalah aksi yang paling sering dilakukan, seperti pada aksi terakhirnya pada bulan Februari 2015. Aksi semacam ini tidak jarang menimbulkan kekacauan dibeberapa daerah tersebut dan tidak hanya terjadi sekali (https://www.rappler.com/indonesia/140922-mahasiswa-papua-yogyakarta-dicap-separatis_diakses 28 Agustus 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara besar. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat multi ethnis berpotensi besar menimbulkan ancaman disintegrasi di Republik ini. Konflik - konflik yang selama ini tersembunyi mencuat ke atas permukaan. Berbagai gerakan separatis bermunculan dan mulai mengancam untuk berpisah dari NKRI, salah satunya gerakan separatis OPM yang saat ini menjadi *United Liberation for West Papua (ULMWP)*.

Masalah nasional yang di timbulkan oleh wilayah yang dulunya disebut Nugini Belanda. Dan permasalahan yang lebih kompleks lebih dirasakan oleh

Indonesia dimana proses transisi perubahan sejak runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter di indonesia menjadi sorotan dunia internasional karena berbagai bentuk konflik yang mengalami eskalasi secara signifikan. Bentuk-bentuk konflik internal tersebut mencakup gerakan separatis yang muncul dengan memanfaatkan sentimen etnis, agama maupun ketidakadilan bisa timbul kapan pun di republik ini, salah satunya adalah Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).*

Masalah yang disebabkan oleh OPM atau saat ini bertransformasi menjadi ULMWP merupakan satu contoh dari gerakan separatisme dimana isu HAM merupakan bagian integral dari gerakan tersebut. Konflik antara Indonesia yang gerakan sebenarnya telah dimulai semenjak Papua dikalim menjadi bagian dari NKRI, hanya saja mulai semakin menarik semenjak runtuhnya kekuasaan Soeharto. Ada berbagai faktor yang menjadi alasan mengapa konflik tersebut bisa terjadi. Selain faktor politik, ekonomi, dan juga ideologi, adanya dendam lama terhadap tindakan politik dan militer yang dilakukan oleh pemerintah indonesia menjadi alasan dasar Organisasi Papua Merdekan (OPM) untuk bangkit melawan.

Misalnya, Gerakan separatis Organisi Papua Merdeka (OPM) bermula pada saat peristiwa yang berlangsung pada tanggal 6 juli 1965 terjadi serangan terhadap TNI dari batalion 751 Brawijaya yang menewaskan tiga orang anggota TNI. wilayah yang menclaim bukan bagian dari NKRI yang akibatnya semakin memperparah kemiskinan negara–negara tersebut dikarenakan hancurnya basis-basis ekonomi yang pada dasarnya memang telah rapuh dan akhirnya menimbulkan pernderitaan berkepanjangan terhadap negara tersebut.

Gerakan Perlawanan Rakyat Papua mulai dari Jayapura tahun 1963 dibawah pimpinan Aser Demotokay hingga yang paling parah di Kebar tanggal 26 Juli 1965 dibawah Pimpinan Yohanes Jambuani dan Benyamin Anari serta di Arfai 28 Juli 1965 yang dibawah pimpinan Permenas Fery Awom. Operasi Tumpas dilakukan agar bisa menumpas semua gerakan masyarakat Pribumi Papua yang menantang Indonesia sebelum diadakannya Referendum (PEPERA) pada tahun 1969. (http://oppb.webs.com/apps/blog/show/1624869-analisis-penyebab-konflik papua_ Diakses 28 Agustus 2017)

Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diangap tidak menguntungkan rakyat papua misalnya adalah inpres No. 1/2003 tentang percepatan pemekaran Irjabar dan Irjateng dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77/2007 tentang lambang daerah. PP No. 54/2005 tentang Majelis Rakyat Papua, meskipun kehadirannya merupakan tuntutan *public* dan pemerintah Provinsi Papua, isinya mereduksi wewenang MRP dan mengecewakan sebagian publik di Papua. Kesemuanya itu secara subtansi tidak konsisten dengan jiwa dan subtansi UU No .21/2001 tentang Otsus. Terlebih lagi kurangnya komunikasi yang baik dari kalangan pemimpin Papua, baik dari lembaga negara maupun ditengah masyarakat sipil sehingga tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk secara strategis mempengaruhi bentuk dan arah kebijakan pemerintah pusat yang sesuai dengan aspirasi rakyat Papua.

(http://lib.ui.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=20400878&lokasi=lokal_Diakses 31 Agustus 2017)

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. Melalui kompromi politik tersebut pemerintah bersedia melakukan koreksi untuk tidak mengulang lagi berbagai kebijakan dan bentuk pendekatan pembangunan dimasa lalu yang umumnya tidak berpihak kepada orang Papua, dan berimplikasi pada keterpinggiran dan ketertinggalan orang Papua di segala bidang pembangunan, sehinga berakumulasi pada menguatnya keinginnan/aspirasi untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan implementasi Otsus Papua selama 8 tahun lebih ternyata belum menunjukkan capaian hasil yang maksimal sebagaimana diharapkan semua pihak sehingga menimbulkan kesan seakan-akan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh jajarannya termasuk aparat TNI dan Polri belum menunjukkan komitmen yang kuat untuk secara konsisten melaksanakan amanat undang-undang Otsus secara efektif, jujur, dan komprehensif. Beberapa kebijakan pemerintah pusat justru dianggap mengingkari hasil kompromi tersebut. Bilamana pemerintah dan para pihak penyelenggara negara termasuk provinsi dan kabupaten/kota benar-benar menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan amanat undang-undang Otsus, maka akan terjadi perubahan yang signifikan kearah kemajuan dan perbaikan kualitas kehidupan rakyat Papua dalam berbagai aspek kehidupan menuju kearah tercapainya suasana kehidupan bersama yang

aman, damai, sejahtera dan berkeadilan.seperti yang diamanatkan UUD Negara RI dan akan memberi sumbangan yang signifikan pula bagi integrasi bangsa dan negara yang semakin tokoh.

Perlawanan dan gerakan perjuangan kemerdekaan Papua dan gerakan bersenjata militer Indonesia, bagi bangsa Papua menjadi catatan sejarah yang sulit terhapuskan. Cerita pembunuhan, tempat penyiksaaan, dan segala penderitaan menjadi saksi sejarah dan cerita yang hidup sepanjang masa. Demikian, sejarah lama saat tongkat perjuangan dipimpin oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memiliki basis hampir di semua wilayah di Tanah Papua dan di Victoria, PNG. Suatu perjuangan yang lebih mengedepankan kontak fisik senjata OPM yang berhadapan dengan militer Indonesia.

Perjuangan bersenjata, yang kemudian memakan banyak korban, memberikan refleksi politik bagi pejuang Papua. Maka, munculah perjuangan angkatan muda – intelektual yang berkoordinasi dengan pejuang OPM mendeklarasikan sebuah wadah politik perjuangan Papua yang disebut Presidium Dewan Papua (PDP). Peristiwa monumental ini sebagai salah satu resolusi Kongres Rakyat Papua II (KRP II) pada tanggal 29 Mei sampai 4 Juni tahun 2000 di GOR Cenderawasih, Jayapura. Sejak organisasi perjuangan sipil PDP dideklarasikan, muncullah organisasi-organisasi perjuangan politik Papua. (https://www.library.ohio.edu/indopubs/2000/06/11/0071.html Diakses_21 November 2017)

Kemudian pada tahun 2005, sesudah lima tahun PDP terbentuk, sebuah organisasi politik *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* berdiri.

Tiga tahun berikutnya, tahun 2008, lahir Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Lalu pada bulan Oktober tahun 2011 Kongres Rakyat Papua III muncullah Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).

Tujuan didirikannya *West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)* untuk menghimpun kembali para pemimpin organisasi sayap politik pasca KRP II. KNPB dibentuk untuk menjadi media penyalur aspirasi masyarakat Papua di luar negeri. KNPB pun menjadi cikal bakal berdirinya *Parlemen National West Papua (PNWP)* memiliki basis KNPB di seluruh tanah Papua. Beberapa organisasi politik tersebut di antaranya mendaftarkan *West Papua* untuk menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)* pada 2013 di Kanaky, New Caledonia. Dalam MSG Leader Summit dua tahunan itu, aplikasi keanggotaan *West Papua* disarankan agar menjadi satu karena beberapa organ itu membawa nama *West Papua*.

Pada 2014 ketiga organ politik NFRPB, PNWP, dan WPNCL menyatukan diri dalam satu pergerakan dan perjuangan di bawah payung besar *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* di Saralana, Port Vila, Vanuatu. Lalu *ULMWP* mengajukan aplikasi keanggotaan *West Papua* pada pertemuan dua tahunan *MSG* Leader Summit pada Juni 2015 di Honiara, Solomon Islands. Dan aplikasi *ULMWP* pun diterima sebagai anggota pengamat atau observer member. Para pimpinan *MSG* menjanjikan *ULMWP* akan diterima sebagai anggota penuh pada Juli 2016, namun dinamika politik tampaknya mengulur janji itu tergenapi. (http://honaicenter.org/2016/08/ulmwp-meniti-jalan-keselamatan-di-pasifik/_Diakses 29 Agustus 2017)

Faktor eksternal yang mempengaruhi orang Papua untuk merdeka yaitu dukungan dari beberapa anggota negara *Melanesian* terhadap gerakan separatisme Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Melanesian Spearhead Group (MSG) dibentuk berdasarkan *"Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia"* yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988.

Pada tanggal 7 Juni 1996 ditandatangani sebuah dokumen yang berjudul sama yaitu "*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia",* Kiriwana, Trobriand Island, yang isinya menyepakati kerja sama untuk memajukan perekonomian negara anggota. Dalam KTT ke-16 di Goroka, Papua Nugini, 19 Agustus 2005 disepakati pembentukan Sekretariat MSG yang berkedudukan di Port Vila.

Keputusan untuk menjadikan MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang berjudul *"Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group"* yang draftnya telah diselesaikan pada bulan Maret 2007. Dalam *Agreement* tersebut disepakati untuk menyertakan FLNKS dari Kaledonia Baru sebagai anggota dengan reservasi terhadap pasal 10, 11, dan 12 sesuai dengan pasal 19 ayat 5 *(draft) Agreement* tersebut yang mengatur anggota berstatus sebagai organisasi/wilayah yang bukan negara merdeka.

Pada tanggal 14-15 April 2008 diselenggarakan rangkaian pertemuan MSG yang berpuncak pada KTT ke-17 di Port Vila, Vanuatu, sekaligus peresmian Sekretariat organisasi tersebut. Organisasi ini terdiri dari negara-negara yang memiliki ras Melanesia yaitu Vanuatu, Fiji, Papua Nuigini, Kepulauan Salomon

dan New Caledonia.Visi yang dimiliki oleh *Melanesian Spearhead Group* adalah dekolonisasi dan kebebasan seluruh negara Melanesia dengan upaya mengembangkan identitas dan keterkaitan budaya, politik, sosial dan ekonomi masyarakat Melanesia (https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/MSG.aspx_Diakses_24 Nov 2017)

Forum negara organisasi bangsa-bangsa Melanesia kerap jadi ruang bagi pihak-pihak yang ingin memerdekakan Papua atau melakukan internasionalisasi terhadap Papua karena penduduk Papua memiliki ras yang sama dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group*. Meskipun pemerintah negara anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)* mengakui integrasi Papua dalam NKRI semenjak disahkannya Resolusi PBB No. 2504 pada tanggal 19 November 1969 Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tentang status Papua yang sah menurut hukum internasional menjadi bagian integral NKRI, namun pada kenyataannya *Melanesian Spearhead Group* melakukan bentuk-bentuk intervensi terhadap gerakan separatisme di Papua.

Kawasan melanesian yang secara geografis berbatasan langsung dengan Indonesia bahkan beberapa provinsi diwilayah bagian timur memiliki kesamaan etnis melanesia, sudah semestinya menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pasifik selatan dipandang sebagai *sphere of primary strategic interest* baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Hal ini justru mempunyai posisi strategis bagi upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedekatan tersebut menjadi modal utama

counter gerakan separatism papua dan kampanye simpatisan mereka di beberapa negara dalam forum *Melanesian Spearhead Group (MSG).*

Maka dari itu pada tahun 2011 pada KTT MSG yang ke 18 Indonesia mengambil kebijakan politik luar negerinya dengan cara yang signifikan melalui jalur diplomasi untuk menghentikan dinamika tentang Papua, untuk pertama kalinya indonesia diterima sebagai pengamat, mengingat kedekatan geografis yang berdekatan dengan kawasan pasifik selatan, lima provinsi yang ada di bagian timur Indonesia juga merupakan bagian dari ras melanesia. Diplomasi yang dilakukan Indonesia yaitu melalui menjadi negara pengamat kemudian disusul lagi Indonesia mempromosikan kerjasama dengan Negara - negara Anggota Melanesia, Indonesia membangun kerjasama teknis di berbagai bidang, seperti di bidang perikanan, produksi kerajinan, seni budaya, dan diplomasi.

Pada bulan Mei 2015, Indonesia melakukan kerja sama teknis untuk peningkatan kapasitas dengan negara anggota MSG sebanyak 130 program yang diikuti oleh 583 peserta. Selain itu juga pada KTT MSG ke-20 di Haniora, Kepulauan Salomon, yang diselengarakan pada 24-25 Juni 2015 status indonesia yang sebelumnya menjadi pengamat meningkat menjadi anggota asosiasi. Disela-sela pertemuan tersebut Wamenlu Fachir juga mengadakan berbagai pertemuan bilateral, antara lain dengan Perdana Menteri dan Menlu Fiji, Perdana Menteri dan Menlu Papua Nugini, Menlu Kepulauan Solomon, serta pejabat dari Vanuatu. Pertemuan-pertemuan bilateral tersebut dilakukan sebagai upaya pendekatan konkret terkait implementasi kerja sama dalam konteks MSG ke depan

(http://www.antaranews.com/berita/503823/indonesia-peroleh-status-anggota-asosiasi-dalam-msg_Diakses 31 Oktober 2017).

Untuk memperoleh dukungan, Indonesia mempererat kerjasama dengan Fiji, kerjasama antara kedua negara tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1874 – 2009 yang merupakan suatu langka bagi indonesia untuk memperoleh dukungan. Hubungan bilateral RI-Fiji menuju tingkatan baru dengan terlaksananya kunjungan PM Frank Bainimarama ke Indonesia pada 5-6 April 2011, pembukaan Kedutaan Besar Fiji di Jakarta, dan penandatanganan perjanjian *Development Cooperation Agreement* (DCA) pada 27 Mei 2011. Kerjasama yang selama ini dilakukan Indonesia - Fiji mulai dari politik ekonomi, sosial budaya hingga pertahana dan keamanan. kerjasama yang di bangun indonesia dengan Fiji yaitu dalam bidang ekonomi, perikananan, pertanian, budaya dan militer. Khusus untuk kerjasama militer, kerjasama Indonesia dan Fiji dalam manajemen pengelolaan bencana seperti pelatihan menghadapi kondisi bencana dan dalam penjaga perdamaian. Indonesia juga membangun kerjasama dengan Papua Nugini melalui kerjasama kebudayaan, perdagangan, kerjasama militer dan kerjasama di bidang LNG (gas alam cair) kelapa sawit serta kepolisian intelligent sharing.

Selain Fiji Indonesia juga meningkatkan hubungan denga Papua Nugini. Peningkatan hubungan bilateral RI-PNG sepanjang 2013 telah memberikan bobot strategis dari hubungan dan kerja sama bilateral, khususnya dalam konteks menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan yang erat antara kedua negara.

Di tahun 2013 Perdana Menteri Papua Nugini O‟‟Neill ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain penandatanganan kesepakatan kemitraan komperehensif, kedua negara juga menandatangani 11 nota kesepahaman atau MoU. Beberapa bidang yang dilakukan kerjasama meliputi hukum ekstradisi, batas wilayah, pemuda dan olahraga, energi dan pariwisata. Dengan disepakatinya kemitraan komperehensif beserta plan of action implementasinya, kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Secara historis Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler di tahun 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik setelah Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada 16 september 1975. Secara umum, hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini selama ini telah berjalan dengan baik. Indonesia menempatkan Papua Nugini sebagai negara yang penting karena mempunyai perbatasan langsung, secara darat maupun laut. Papua Nugini juga melihat Indonesia sebagai salah satu negara penting di kawasan yang dapat membantu Papua Nugini dalam menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di Asia. (https://www.scribd.com/doc/118334810/hubungan-Internasional-Indonesia-dengan-Papua-nugini. diakses_30 Nov 2017) .

Untuk mendapatkan pijakan serta referensi secara ilmiah untuk penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu khususnya yang membahas terkait dengan Indonesia dan *Melanesian Spearhead Group (MSG)*, dalam tesisnya dengan judul "Alasan Indonesia Melakukan Kerjasama Dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG)"* yang dibuat pada tahun 2016 oleh Wirda Wanda Sari Bekarekar, Pascasarja Universitas Muhammadiah Yogyakarta.

Peneliti dalam tesisnya tersebut mengungkapkan bahwa Kebijakan politik luar negeri Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Menurut peneliti bahwa

kebijakan luar Indonesia sangat terarah ke wilayah barat sehingga minim sekali untuk menoleh ke wilayah timur. Hal tersebut penulis garis bawahi dengan mengubah pandangan dari barat ke timur menjadi dari timur ke barat, serta menjadikan Pasifik Selatan sebagain halaman depan bagi Indonesia. Kedua, dalam tesisnya penulis bertujuan menggunakan karakter kebijakan baru Joko Widodo yaitu dalam peningkatan partisipasi di level Internasional/regional. Pembahasan dalam tesisnya bertujuan mendiskusikan hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penerapan kebijakan di masa depan. Dalam hal ini penulis melihat dari sisi Indonesia yang melibatkan diri di dalam forum Pasifik Selatan dengan melihat pertimbangan-pertimbangan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam masa perintahan Joko Widodo. Tujuan dari penelitian tersebut lebih meyoroti keterkaitan antara Indonesia, *Melanesian Spearhead Group*, dan kelompok separatis yang ingin memerdekakan Papua. Peneliti menggunakan Aktor Rasional untuk melihat proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*. Dalam konteks ini tentunya kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat berpengaruh terhadap strategi Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam skripsi yang berjudul "Pengajuan Keanggotaan Indonesia Dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)"* yang dibuat pada tahun 2016 oleh Putri Ayu Kusuma Wardhani, Universitas Gajah Mada.

Peneliti berpendapat bahwa pengajuan keanggotaan Indonesia pada MSG merepresentasikan neo-liberal institusional dalam Politik Luar Negeri Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui *ecumenical diplomacy* dan *look east diplomacy* di sub-regional Melanesia sebagai upaya untuk dapat mempengaruhi kebijakan terkait kepentingan Indonesia di Papua Barat dengan tidak mengesampingkan kepentingan negara-negara anggota MSG dalam aspek lain. Hal ini dipicu oleh kecenderungan *Melanesian Spearhead Group* yang digunakan oleh kelompok Melanesia, *United Liberation Movement For West Papua (ULMWP)* dari Indonesia dan FLNKS dari Kaledonia Baru, menggalang dukungan untuk mencapai kemerdekaan.

Dalam karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah sebuah jurnal yang berjudul "Kerjasama Teknik Indonesia - *Melanesian Spearhead Group (MSG)* Terhadap Keutuhan NKRI di Papua Tahun 2011-2014 dibuat oleh Lia Kartika Tampubolon pada tahun 2015, Universitas Riau.

Peneliti berpendapat bahwa negara merupakam esensial bagi kehidupan warga negaranya, tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan kehidupan manusia menjadi terpencil, miskin, sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan dan singkat, dengan demikian negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Bentuk diplomasi Indonesia diwujudnyatkan dalam bentuk kerjasama Teknik dengan negara anggota *Melanesian Spearhead Group.*

Kerjasama dibentuk karena setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.

Persamaan peneliti penelitian yang dilakukan diatas mengangkat masalah yang sama, yaitu mengenai diplomasi yang merupakan cerminan dari politik luar negeri indonesia. Kedaulatan bagi sebuah negara sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan keutuhan wilayah suatu negara, karena besar kecilnya penghayatan suatu bangsa atas konsepsi ruangnya akan menentukan besar kecilnya wilayah negaranya.

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian diatas, dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota MSG terkait dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggapi upaya diplomasi yang di lakukan Indonesia untuk mencegah gerakan separatis menjadi bagian dari anggota MSG. Mengingat ULMWP merupakan suatu kelompok separatis mempunyai tempat yang sebelumnya sama dalam MSG dan kemudian Indonesia yang sebelumnya pengamat/observer kemudian meningkat menjadi asosiasi member akan berdampak pada posisi ULMWP dimana dukungan dari Negara-negara MSG mulai berkurang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai upaya diplomasi Indonesia untuk mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG dengan beberapa alasan antara lain : pertama, Indonesia adalah negara yang berdaulat dan setiap wilayah yang termasuk kedalam NKRI ini haruslah dijaga oleh negara lain maka dari itu upaya yang dilakukan oleh Indonesia ini untuk mencegah bergabungnya ULMWP dalam MSG merupakan langkah yang tepat bila mengacu kepada kepentingan nasional untuk menjaga kedaultan negaranya, karena tidak wajar jika gerakan separatis menjadi anggota dalam suatu organisasi yang mana didalamnya beranggotakan negara. Kedua Indonesia telah mempunyai aturan dalam Undang-undang bahwa Indonesia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengatur, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan hidup. Ketiga duduknya indonesia menjadi anggota asosiasi dalam MSG menjadikan indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan Papua agar tidak melepaskan diri dari Indonesia dan dengan banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) membuat Indonesia merasa siap untuk menjaga keutuhan NKRI agar Papua tidak melepaskan diri dari Indonesia.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Upaya Diplomasi Indonesia Untuk Mencegah Gerakan Separatis *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)* Bergabung Dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG) (2014-2017)* ”**

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Interasional antara lain:

1. Organisasi Internasional

Dalam mata kuliah ini peneliti ingin mempelajari mengani peran aktor yang terlibat dalam interaksi antar negara yang bersifat internasional dan menciptakan interaksi global didalamnya pada penelitian ini akan membahas mengenai salah satu organisasi internasional yaitu *Melanesia Spearhead Group (MSG)* yang mana organisasi internasional tersebut merupakan menarik untuk dikaji karena ada kaitannya dengan gerakan separatis di *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).*

2. Politik Luar Negeri

Dalam mata kuliah ini membantu menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh negara dalam interaksinya dengan negara lain serta kebijakan politik luar negeri suatu negara untuk menghadapi perubahan yang terjadi diluar wilayahnya demi mencapai tujuan ataupun kepentingan nasionalnya. Dimana pemerintah indonesia dengan sistem politik luar negeri bebas aktif merupakan landasan dasar dalam menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain dan dengan organisasi internasional lainnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

3. Diplomasi HI di Australia-Pasifik

Dimana dalam penelitian ini terletak di Kawasan Pasifik dan mata kuliah ini telah memberikan pemetaan mengenai diplomasi di kawasan Australia dan Pasifik khususnya di wilayah Indonesia - Papua.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang dikemukakan diatas maka permasalahan dapat di rumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan permasalah yang telah diungkapkan diatas, maka dalam penyusunan penelitian saya ingin menguatarakan rumusan masalah "Sejauh mana upaya Diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI untuk mencegah gerakan separatis *United Libertion Movement for West Papua (ULMWP)* bergabung dengan *Melanesian Spearhead Group (MSG)?*

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor, dimana dalam menilai peran Pemerintah dalam suatu negara dalam menjaga keutuhan negara dalam mencapai tujuannya

1. Upaya – upaya diplomasi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP untuk bergabung dengan MSG?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam dalam melakukan Diplomasi untuk mencegah gerakan separatis ULMWP untuk bergabung dengan MSG?
3. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota Melanesian *Melanesian Spearhead Group (MSG)?*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah mayor sejauh mana upaya diplomasi yang telah dilakukan Pemerintah RI dalam mencegah bergabungnya gerakan separatis ULMWP bergabung dengan *Melanesian Sperhead Group (MSG).*

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah minor diantaranya adalah :

1. Dalam penelitian ini diaharpakan dapat mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG?
2. Untuk mengetahui, meneliti dan memahami kendala serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah gerakan separatis ULMWP bergabung dengan MSG?
3. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara-negara anggota MSG.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dan sebagai bahan masukan untuk pemerintah Indonesia untuk dapat mencegah bergabungnya gerakan separatisme dalam forum Melanesian Spearhead Group dan diharapkan juga dapat berguna untuk menguji konsep yang dipergunakan terkait dengan mata kuliah, Organisasi Internasional, Diplomasi HI di Australia - Pasifik dan Ham dan Demokrasi dalam menjelaskan berbagai fenomena terkait dengan peran pemerintah dalam menjaga keutuhan negaranya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dibidang Ilmu Hubungan Internasional
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dan Umum.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat akademi dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia Bandung